

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P., & Rasida. (2019). *Mahir Praktik Perpajakan Bendahara: Edisi 2019 dilengkapi ringkasan dan studi kasus*. WiKeupedia.
- Aji, I. P. (2020). *Aspek Perpajakan Belanja Barang dan/atau Jasa Oleh Instansi Pemerintah*. CV. Pena Persada.
- Barata, A. A., Djuhadiat, M. H., & Toruan, R. L. (2006). *Pot-put & Kepala : Pemotongan-Pemungutan Pajak Penghasilan dan Kredit Pajak Luar Negeri (2nd ed.)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- BPMI, S. (2020, Desember 14). *Presiden: Kejaksaan Harus Bersih dan Jadi Acuan Penegak Hukum yang Profesional dan Berintegritas*. Retrieved from Presiden Republik Indonesia: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-kejaksaan-harus-bersih-dan-jadi-acuan-penegak-hukum-yang-profesional-dan-berintegritas/>
- Denziana, A., & Sutanto, H. (2015). Pengaruh Peran Acoount Representative Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 6(1), 1-22.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus (3rd ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjowiryo, M. (2020). Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(4), 285-310.
- Khalida, M. S., & Setiawan, B. (2021). Pelaksanaan Pajak Penghasilan atas Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah KPP Pratama Tegal. *EDUCORETAX*, 1(2), 104-127.
- Markus, M. (2005). *Perpajakan Indonesia : suatu pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nawawi, B. M. (2017). *Perpajakan Bendahara Desa*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Pemerintah Indonesia. (2019). PJA Nomor PER-006/A/JA/07/2017. *Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Pemerintah Indonesia. (2017). PMK Nomor 34/PMK.010/2017. *Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*.

- Pemerintah Indonesia. (2021). PMK Nomor 45/PMK.01/2021. *Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak*.
- Pemerintah Indonesia. (2019). PMK Nomor 231/PMK.03/2019. *Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Ratnafuri, K., & Herawati, N. (2014). Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(3), 471-492.
- Silitonga, D. F., & Wijaya, S. (2021). *Ekstensifikasi Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak*. Guepedia.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Sorongon, C. T. (2014). Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 2(1), 704-714.
- Subair; Su'un, Muhammad; Ratnasari; Lannai, Darwis; Rahim, Syamsuri. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(4), 37-45.
- Subandi, H., & Fadhil, M. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1-16.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105-121.
- Wijayanti, W. K., & N, Y. A. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara dan Efektifitas Peraturan Perpajakan. *Media Ekonomi*, 18(1), 27-40.
- Yusmadi., Dahlan., & Syahbandir, M. (2014). Hak dan Kewajiban Bendaharawan Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan di Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 23-31.